



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI SABTU, 6 APRIL 2013



DAFTAR ISI

Smelter	1
Pertamina	2
Infrastruktur	3
Waduk Jatigede	4
Pagu Indikatif	5



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pembangunan Smelter Komitmen Perusahaan Ditunggu Hingga 2014	<div>- Dirjen Mineral Batu Bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan masih menunggu komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri</div> <div>- Pemerintah akan terus mengajak para pelaku usaha mencari jalan keluar persoalan pengolahan dan pemurnian bijih mineral yang diamanatkan paling lambat dilakukan 2014</div>					

► PEMBANGUNAN SMELTER

Komitmen Perusahaan Ditunggu Hingga 2014

JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menunggu niat baik dari para pelaku usaha pertambangan untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) bijih mineral di dalam negeri hingga 2014.

Direktur Jenderal Mineral Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan masih menunggu komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Pasalnya, para pelaku usaha pertambangan telah melakukan pakta integritas untuk menerapkan UU No. 4/2009.

"Titik tekannya kan nilai tambah

itu harus di dalam negeri, kalau ada niat baiknya kami masih memikirkan [batas smelter pada 2014]. Kan sebelumnya ada pakta integritas, lalu kami akan evaluasi," katanya di Jakarta, Jumat (5/4).

Pemerintah akan terus mengajak para pelaku usaha mencari jalan keluar persoalan pengolahan dan pemurnian bijih mineral yang diamanatkan paling lambat dilakukan 2014. Solusi tersebut juga harus mencakup pembangunan *smelter* yang umumnya memerlukan waktu lebih dari setahun.

Selama ini, pengusaha dengan pemerintah memiliki pandangan berbeda terkait dengan pengolahan

an dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri. Pemerintah terus berpegang proses pengolahan dan pemurnian harus dilakukan di dalam negeri, karena diamanatkan UU No. 4/2009, sedangkan pengusaha menilai ada beberapa komoditas yang kurang ekonomis apabila diolah dan dimurnikan di dalam negeri.

"Pandangan-pandangan ini yang harus kami satukan dengan pengusaha, karena pengusaha dengan pemerintah memiliki fokus yang berbeda. Yang penting semua memiliki komitmen untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk meningkatkan

nilai tambah," jelasnya.

Thamrin menegaskan pemerintah tidak akan melakukan revisi terhadap UU No. 4/2009 jika pada 2014 belum ada *smelter* baru yang beroperasi. "Tidak ada revisi UU, semuanya sesuai amanat UU itu, kami akan melihat ada tidak niat baik dari pengusaha itu."

Perluasan PT Smelting Gresik, sebenarnya dapat menjadikan pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga menjadi ekonomis. Pasalnya, komoditas itu menghasilkan produk sampingan berupa *gypsum* dan asam sulfat yang dapat dimanfaatkan oleh industri dasar lain yang ada di dalam negeri. (Lif Sunardi)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pertamina Pasok Pelumas untuk Kapal Pelni	<div><div>PT. Pertamina (Persero) akan memasok pelumas untuk kapal-kapal PT. Pelni. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perseroan itu untuk ekspansi pasar pelumas di dalam negeri</div><div>Kerja sama ini diharapkan bisa memperkuat posisi Pertamina di pasar pelumas domestik</div><div>Pertamina juga telah mengekspor pelumas ke 24 negara, baik Asia, Eropa, maupun Afrika</div></div>				PT. Pertamina	

INDUSTRI

Pertamina Pasok Pelumas untuk Kapal Pelni

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) akan memasok pelumas untuk kapal-kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perseroan itu untuk ekspansi pasar pelumas di dalam negeri.

Perjanjian kontrak pembelian pelumas untuk armada kapal badan usaha milik negara (BUMN) pelayaran itu ditandatangani Direktur Utama PT Pelni Jussabella Sahea dengan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya, Jumat (5/4), di Hotel Borobudur, Jakarta.

Jussabella mengatakan, Pelni sangat memperhatikan kualitas pelumas untuk kapal yang diooperasikan perusahaan itu. Selama ini, mesin kapal milik perseroan tersebut terus berjalan sepanjang tahun. Untuk itu, pihaknya berhati-hati agar tidak terjadi penurunan fungsi mesin karena pergantian pelumas yang berakibat terganggunya kegiatan operasi kapal perusahaan itu.

Sebelumnya, Pelni telah terikat kontrak jual-beli bahan bakar minyak dengan Pertamina.

Namun, perusahaan pelayaran itu belum memakai pelumas Pertamina dalam mengoperasikan armadanya. Dengan adanya kontrak pembelian pelumas itu, pihaknya meminta agar Pertamina menjaga mutu suplai produknya.

Saat ini, kapal milik Pelni berjumlah 35 kapal. Sebanyak 25 di antaranya adalah kapal penunjang. Sebagai tahap awal, Pertamina akan memasok pelumas untuk 10 kapal Pelni. "Uji coba pelumas Pertamina pada mesin kapal Pelni telah dilakukan selama 500 jam," kata Jussabella.

Wakil Presiden Pelumas PT Pertamina Supriyanto Dwihuto-mo mengatakan, sebagai tahap awal, Pertamina akan mengisi pelumas bagi kapal Pelni untuk pertama kali dengan volume 50.000-100.000 liter senilai Rp 20 miliar. Pengisian selanjutnya untuk 10 kapal sebanyak 30.000 liter atau senilai Rp 6 miliar per bulan.

Hanung berharap, kerja sama antara Pertamina dan Pelni ini nantinya dapat terjalin dengan baik dan lebih berkembang sebagai bentuk sinergi antar-BUMN.

Kerja sama ini diharapkan bisa memperkuat posisi Pertamina di pasar pelumas domestik. Selama ini, Pertamina berpengalaman melayani kebutuhan pelumas perusahaan pelayaran berskala besar, seperti Tempuran Mas dan Meratus.

Sejauh ini, Pertamina merupakan produsen pelumas terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi sekitar 600.000 kiloliter per tahun dan penguasaan pasar sekitar 60 persen di pasar domestik. Tahun ini, Pertamina menargetkan produksi pelumas perseroan itu mencapai 650.000 kiloliter seiring dengan ekspansi pasar yang dilakukan perusahaan tersebut.

Selain itu, Pertamina juga telah mengekspor pelumas ke 24 negara, baik di Asia, Eropa, maupun Afrika. (EVY/K10)



KEMENTERIAN
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
7 Jalan Layang Selesai Dua Tahun	<div>- Proyek pembangunan jalan layang dan terowongan termasuk proyek tahun jamak</div> <div>- Dari 12 proyek pembangunan jalan layang dan terowongan di DKI Jakarta, tujuh diantaranya dibangun untuk mendukung perjalanan kereta api</div>					

INFRASTRUKTUR

7 Jalan Layang Selesai Dua Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Tujuh jalan layang dan terowongan yang akan dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiasati pelintasan sebidang dengan kereta api baru selesai dua tahun lagi. Selagi menunggu jalan layang dan terowongan selesai dibangun, tak ada cara lain selain menertibkan pelintasan yang tidak dijaga.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Manggas Rudy Siahaan, Jumat (5/4), mengatakan, proyek pembangunan jalan layang dan terowongan termasuk proyek tahun jamak. "Kami berharap proyek ini bisa segera direalisasikan. Kini masih dalam tahap lelang. Maksimal dua tahun anggaran bisa selesai," katanya.

Dari 12 proyek pembangunan jalan layang dan terowongan di DKI Jakarta, tujuh di antaranya dibangun untuk mendukung perjalanan kereta api. Ketujuh proyek itu adalah Madiun-Halimun, Cik Ditiro-Guntur, Garuda, Industri, Gunung Sahari, Mangga

Dua, dan Permata Hijau.

Ditanya soal total anggaran pembangunan itu, Rudy mengatakan tidak hafal besarnya. "Ini tahun jamak, jadi tidak semua anggaran ada di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun ini," ujarnya.

Pembangunan jalan layang dan terowongan, lanjut Rudy, menggunakan kontrak rancang bangun guna mempercepat realisasi, karena perencanaan dan pelaksanaan berada dalam satu waktu.

Sembari menunggu jalan layang dan terowongan selesai dibangun, Rudy menyatakan akan berkoordinasi dengan pengelola perkeretaapian untuk mencari solusi menangani pelintasan sebidang. Pelintasan itu akan semakin sering ditutup karena frekuensi perjalanan kereta api ditambah sehingga bisa menimbulkan



Bisa ditutup untuk menghindari kecelakaan atau ditingkatkan menjadi pelintasan resmi. Kedua, diberi palang dan alarm.

Udar Pristono

bulkan kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, untuk mengatasi pelintasan yang dijaga oleh warga, hanya ada dua cara. "Bisa ditutup untuk menghindari kecelakaan atau ditingkatkan menjadi pelintasan resmi. Kedua, diberi palang dan alarm," katanya.

Tidak mudah

Penutupan pelintasan sebidang tidak mudah dilakukan terlebih karena ada faktor sosial kemasyarakatan. Selain itu, penutupan pelintasan sebidang sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (pemda) dan Kementerian PU untuk membuat jalan layang atau *underpass*.

Dari catatan Ditjen Perkeretaapian, terdapat 156 pelintasan resmi yang dijaga di seluruh wilayah Daop I. Adapun pelintasan yang resmi tetapi tidak dijaga berjumlah 348 titik.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop I mencatat, sepanjang 2012 terjadi 74 kecelakaan di pelintasan sebidang, atau rata-rata 6-7 kejadian per bulan. Dari seluruh kecelakaan yang terjadi, tercatat 46 orang meninggal dan 32 orang mengalami luka-luka.

Adapun pada bulan Januari

hingga Maret 2013 tercatat tujuh tabrakan antara kereta dan kendaraan umum di wilayah Daop I. Akibatnya, tiga orang luka berat.

Direktur Keselamatan Ditjen Perkeretaapian Hermanto Dwi-atmoko mengatakan, penutupan pintu pelintasan bukanlah perkara mudah karena ada persoalan sosial dari masyarakat setempat. "Namun, pelintasan sebidang ini harus ditutup karena dalam aturan semua pelintasan harus ditutup," kata Hermanto.

Penutupan pelintasan sebidang, kata dia, sangat bergantung pada kesiapan setiap pemda serta Kementerian PU, karena kewenangan membangun jalan layang atau terowongan ada di pemda atau kementerian. Ditjen Perkeretaapian, menurut Hermanto, hanya membangun pelintasan tidak sebidang apabila ada pembangunan jalan kereta, seperti di jalur ganda pantai utara.

Wakil Kepala PT KAI Daop I Sugeng Priyono mengatakan, pintu pelintasan sebidang akan

semakin sering ditutup dengan meningkatnya jadwal perjalanan kereta di wilayah Daop I.

Untuk kereta rel listrik, mulai 1 April ini, terjadi penambahan frekuensi perjalanan kereta dari 514 menjadi 575 kali per hari. "Hal ini berdampak ke pemakai jalan raya, bukan ke perjalanan kereta," kata Sugeng.

Oleh karena itu, dia berharap pemda bersedia terlibat untuk mengatasi pelintasan sebidang ini agar tidak menimbulkan kemacetan yang semakin parah di masa mendatang. Apalagi, PT KAI berencana meningkatkan kapasitas angkut penumpang menjadi 1,2 juta orang per hari di tahun 2019. "Saat ini, belum ada separuh dari target itu. Sementara itu, dampak di jalan raya sudah bisa dirasakan bertambahnya kemacetan," kata Sugeng.

(FRO/ART)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Proyek Jatigede Sebelum Diselesaikan, Pusat Relokasi Warga Lebih Dahulu	<div>- Untuk menyelesaikan pembangunan Waduk Jatigede di Kab. Sumedang, Jawa Barat, pemerintah akan lebih dulu menyelesaikan masalah relokasi warga yang tinggal di daerah bakal genangan waduk</div> <div>- Tahap awal relokasi warga Jatigede dilakukan terhadap 697 keluarga dengan rumah yang dibangun pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat, sementara tanahnya disiapkan Prov. Jabar</div>					

PROYEK JATIGEDE

Sebelum Diselesaikan, Pusat Relokasi Warga Lebih Dulu

BANDUNG, KOMPAS — Untuk menyelesaikan pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pemerintah akan lebih dulu menyelesaikan masalah relokasi warga, yang tinggal di daerah bakal genangan waduk. Pemerintah menyiapkan tanah seluas 136 hektar sebagai lokasi hunian baru.

Pemerintah juga tetap akan mengedepankan pendekatan dialogis untuk menyikapi fenomena "rumah hantu" atau rumah yang sengaja dibangun baru demi mendapatkan uang ganti rugi pembebasan tanah yang nilainya jauh lebih besar.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada pers usai menggelar rapat percepatan pembangunan Waduk Jatigede di Gedung Sate, Bandung, Jumat (5/4). Rapat juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan kepala dinas, serta pihak-pihak lainnya.

"Saat ini, pembangunan mencapai 72 persen. Namun, pengerjaan selanjutnya terhambat dengan maraknya unjuk rasa yang menyebabkan alat berat untuk pembangunan waduk itu tak bisa dilakukan. Dengan kerja keras, kami percaya Waduk Jatigede bisa mulai digenangi pada Oktober tahun ini," ujar Djoko. Dijadwalkan, waduk ini bisa diresmikan oleh presiden pada Februari 2014.

Waduk Jatigede sebenarnya proyek yang dirintis sejak tahun 1960, tetapi terbengkalai hingga kemudian disebut pengerjaannya dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Dengan adanya waduk tersebut, areal seluas 4.896 hektar, yang mencakup wilayah 30 desa di lima kecamatan, yaitu Situraja, Cisit, Darmaraja, Jatigede, dan Wado, bakal terendam. Namun, waduk ini bisa menjamin pengairan bagi 90.000 hektar sawah dengan irigasi teknis

serta memproduksi listrik sebesar 110 megawatt.

Lebih jauh, menurut Djoko, tahap awal relokasi warga Jatigede dilakukan terhadap 697 keluarga dengan rumah yang dibangun pusat melalui dana Kementerian Perumahan Rakyat. Sementara tanahnya disiapkan Provinsi Jabar.



Saat ini,
pembangunan
mencapai 72 persen.

Djoko Kirmanto

Empat waduk

Untuk mengurangi dampak banjir, irigasi pertanian, dan sumber bahan baku air minum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membangun empat waduk di empat kabupaten. Keempat waduk itu adalah Waduk Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar, Waduk Mateng-geng di Kabupaten Cilacap, dan Waduk Logung di Kudus. Volume air yang bisa ditampung oleh empat waduk itu mencapai 200-300 juta meter kubik.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jateng Prasetyo Budie Yuwono, pemerintah sebelumnya akan membangun tapak keempat waduk itu. (ELD/HEN)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Anggaran Proyek Konektivitas Naik Tipis	<div>- Pemerintah menetapkan pagu indikatif untuk proyek-proyek sebesar Rp.46,02 triliun pada 2014, hanya meningkat Rp.4,8 triliun dari 2013 yang sebesar Rp.41,2 triliun</div> <div>- Anggaran proyek konektivitas dinilai kurang</div> <div>- Pemerintah akan melakukan refocusing dalam pengalokasiannya</div>					

► PAGU INDIKATIF

Anggaran Proyek Konektivitas Naik Tipis

JAKARTA—Pemerintah menetapkan pagu indikatif untuk proyek-proyek konektivitas sebesar Rp46,02 triliun pada 2014, hanya meningkat Rp4,86 triliun dari 2013 yang sebesar Rp41,2 triliun.

Hedwi Prihatmoko & Ana Noviani
redaksi@bisnis.co.id

Dedy Supriadi Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, mengatakan anggaran sebesar itu sebenarnya dirasakan masih kurang.

Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada, lanjutnya, pemerintah akan melakukan *refocusing* dalam pengalokasiannya.

“Yang difokuskan terutama adalah pencapaian RPJMN 2010-2014 dan MP3EI,” katanya di Gedung Bappenas, Senin (8/4).

Dalam pagu indikatif untuk proyek konektivitas, pengalokasian terbesar diberikan untuk pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan serta jalan tol sebesar Rp21 triliun. Adapun, proyek konektivitas laut dialokasikan sebesar Rp5,47 triliun, sedangkan proyek konektivitas udara dialokasikan sebesar Rp6,28 triliun.

Adapun sisanya yang sebesar Rp13,27 triliun diperuntukkan bagi prasarana dan fasilitas pendukung kereta api, pembangunan dan rehabilitasi sungai, danau, dan penyebe-

rangan, serta pengadaan bis.

Pada kesempatan yang sama, Armida S. Alisjahbana, Menteri PPN/Kepala Bappenas, mengungkapkan pagu indikatif untuk belanja modal pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 hampir sama dengan tahun ini. Namun, dia tidak mengungkapkan besaran belanja modal RKP 2014. “Saya tidak hafal, tetapi kira-kira belanja modal itu kurang lebih sama totalnya,” katanya.

Armida mengungkapkan pendanaan di dalam RKP 2014 akan memprioritaskan pada efisiensi anggaran, penetapan ulang fokus pendanaan program dan kegiatan, dan prioritas tambahan dana pada isu-isu strategis.

Sementara itu, pagu indikatif belanja kementerian/lembaga negara pada 2014 ditetapkan sebesar Rp561,2 triliun. Pagu indikatif tersebut belum termasuk anggaran Pemilu dan BPJS yang mencapai Rp50 triliun.

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pagu indikatif belanja negara pada 2014 diperkirakan mencapai Rp1.900 triliun. Pagu tersebut meningkat sekitar 20% dibandingkan dengan belanja negara APBN 2013 yang mencapai Rp1.683,0 triliun.

“Dari Rp1.900 triliun itu, *resource envelope* untuk lembaga dan kementerian di pusat jumlahnya Rp561 triliun. Secara riil nanti saat nota keuangan disampaikan, dan akan ditambah Rp50 triliun lagi,” tutur Menkeu.

Tambahan anggaran belanja K/L

sebesar Rp50 triliun, imbuhnya, merupakan pagu anggaran penyelenggaraan Pemilu 2014 sebesar Rp16 triliun, anggaran penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Rp8,52 triliun dan sisanya sekitar Rp25 triliun untuk anggaran kenaikan gaji PNS.

Apabila dikalkulasi, total pagu indikatif belanja K/L pada 2014 mencapai Rp611,2 triliun. Pagu tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran belanja K/L dalam APBN-P 2012 Rp547,92 triliun dan APBN 2013 yang sebesar Rp594,59 triliun.

Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan besaran dan arah kebijakan pada tahun anggaran 2014 kepada K/L dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia.

Menkeu berharap penyusunan RKP dan RAPBN 2014 dapat berlangsung dengan efisien, menghindari duplikasi, dan menghindari berulangnya kegiatan yang perlu dianggarkan.

“Sekarang K/L akan selesaikan rencana mereka untuk dibicarakan di *trilateral meeting*. Jadi pos-pos yang spesifik belum dibicarakan,” ujarnya.

TARGET PEMBANGUNAN

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo mengatakan dalam penyusunan RKP dan RAPBN 2014, K/L diharapkan dapat memenuhi target pembangunan meski dengan anggaran yang terbatas.

“Biasanya K/L minta anggaran sebesar-besarnya, tetapi kita kan kemampuan duitnya terbatas dan tidak bisa memenuhi semua,” ujar Herry.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, tema RKP 2014 adalah memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

► Anggaran proyek konektivitas dinilai kurang.

► Pemerintah akan melakukan *refocusing* dalam pengalokasiannya.